

Polarisasi Politik Islam Di Tengah Pandemi Covid-19 Dan Peta Politik 2024

Syahrir Karim

Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar

Email: syahrir.karim@uin-alauddin.ac.id

Di tengah pandemi covid-19, tensi politik tanah air semakin tinggi dengan identitas politik masing-masing. Pandemi ini berhasil membentuk sebuah polarisasi politik yang semakin tajam khususnya di kalangan umat Islam. Terbangun sebuah blok politik yang memperhadapkan antara revivalis Islam dan kelompok tradisional-moderat. Kelompok revivalis Islam ini cenderung mengusung isu penegakan Syariah dan khilafah, oleh ormas-ormas Islam seperti FPI (Front Pembela Islam), eks HTI (Hizb Tahrir Indonesia), dan lain-lain termasuk alumni 212. Sedangkan kelompok tradisional-moderat Islam ini cenderung lebih pro-pemerintah. Dalam konteks kontestasi pilpres 2024, polarisasi ini akan terus berlanjut. Pertarungan ideologi dan sentiment identitas keberagamaan semakin memperlebar ruang polarisasi politik di tengah umat Islam. Ketegangan politik atas nama agama (Islam) akan berbanding lurus dengan fenomena menguatnya pragmatisme politik partai Islam dan ormas-ormas Islam di Indonesia. Implikasi dari fenomena ini, disamping menuai gerakan membangun citra buruk pemerintah karena dianggap gagal mengatasi covid-19 ini dengan segala kebijakannya, juga akan memperjelas peta politik umat Islam menuju 2024.

Kata kunci: *Polarisasi politik, peta politik 2024, Pandemi covid-19, Partai Islam.*

A. Pendahuluan

Selama pandemic melanda negeri ini, terbangun sebuah pola politik baru dan meningkatnya suhu politik politik. Hal ini kelihatan adanya kecenderungan akibat pandemic covid-19 yang terus menuai banyak masalah dalam penanganannya dan adanya kecenderungan terbangun peta politik menuju 2024. Kelihatan bahwa di saat pandemic ini Indonesia setidaknya dihadapkan dalam dua tantangan besar yakni, pandemic dan polarisasi politik. Jejak polarisasi juga tidak bisa terlepas dari kontestasi politik sebelum-sebelumnya yang masih menyimpan jejak politik yang terus berpengaruh menuju kontestasi politik selanjutnya.

Sebutlah misalnya bagaimana kontestasi politik di DKI Jakarta 2017 turut serta dalam membangun jejak polarisasi politik. Polarisasi ini bisa disebabkan karena beberapa faktor, seperti ideologi, politik dan identitas. Kecenderungan pembelahan ini

disebabkan karena kecenderungan mencari kesamaan identitas bersama seperti, agama, etnis dst. Pembelahan atau polarisasi ini juga terlihat dari perbedaan partai politik dan ideologi. Hal ini kemudian berefek pada buruknya dinamika politik yang terkesan tidak lagi mengedepankan etika bahkan sampai kepada lingkaran persahabatan yang mengancam keutuhan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Fenomena polarisasi politik pada pilkada DKI 2017 tidak bisa dipisahkan dengan polarisasi yang terbentuk pada pilpres 2014. Terdapat dua gerbong besar dalam polarisasi politik dalam pilkada DKI saat itu, yakni mereka yang pro-Jokowi dan pro-Ahok di satu sisi, dan mereka yang anti-Jokowi dan anti-Ahok di sisi yang lain. Peta yang semula cenderung membaik di tahun 2014 kembali menemukan momentumnya di tahun 2017. Jokowi didukung oleh kelompok nasionalis dan sebagian Islam moderat di satu sisi, sementara pihak lawan Jokowi terutama terdiri dari kelompok-kelompok politik Islam lain (termasuk yang menunjukkan corak radikal dan garis-keras).¹

Dalam konteks polarisasi dalam partai politik ini menarik perhatian bagi banyak pihak. Sebagai sebuah negara demokrasi yang menganut banyak partai seperti Indonesia, cukup menjadi sorotan dalam hal kecenderungan partai membangun koalisi baru. Membangun kekuatan baru dalam mencari teman koalisi sebagai kekuatan politik cenderung meningkat disaat pademi ini. Kelihatan partai-partai diluar pemerintah terus bermanuver dalam merespon kebijakan-kebijakan pemerintah.

Secara ideologis, juga kelihatan polarisasi mewarnai langgam politik di masa pandemic ini. Partai-parati ideologis termasuk partai-partai Islam secara umum juga kelihatan tidak mau ketinggalan dalam memanfaatkan momentum politik di masa pandemic ini. Sebutlah misalnya, bagaimana partai-partai Islam ini ikut terbelah dalam merespon kebijakan pemerintah, tidak hanya terkait penanganan covid-19 ini, tapi bagaimana kebijakan pemerintah ini memberi pengaruh pada kehidupan beragama dan

¹ Abdul Gaffar Karim, Mengelola Polarisasi Politik dalam Sirkulasi Kekuasaan di Indonesia: Catatan bagi Agenda Riset, *POLITIKA: Jurnal Ilmu Politik*, Volume 10, Nomor 2, Oktober 2019.

keberagaman di Indonesia. isu-isu seksi seperti, menjaga jarak saat shalat, shalat di rumah dan penutupan masjid, vaksin, hari-hari libur hari-hari besar Islam turut menjadi isu utama bagi parpol dan termasuk ormas-ormas Islam. Kelihatan bahwa ada kecenderungan partai-partai ikut terkotak-kotak dalam merespon kebijakan ini. Ormas-ormas Islam juga mengalami pembelahan dukungan dalam bentuk respon mereka terkait kebijakan pemerintah. Respon ormas-ormas ini juga tidak bisa dipungkiri juga ikut berpengaruh dalam kebijakan-kebijakan negara dan partai politik. Afiliasi parpol ke ormas tertentu bisa menjadi titik temu bagaimana polarisasi politik secara ideologis dan partai politik ini bisa terbaca dengan jelas.

B. Islam dan Polarisasi Politik di tengah Pandemi

Pandemic ini tidak bisa dipungkiri telah terbangun dinamika politik tersendiri. Krisis pandemic ini tetap membutuhkan komitmen kebangsaan untuk menjaga kerukunan dan kebersamaan bagi segenap komponen bangsa. Menghadapi krisis ini justru berbanding terbalik antara kebutuhan masyarakat yang juga mendesak seperti pemulihan kesehatan dan ekonomi. Di sisi yang lain, polarisasi politik semakin tajam dengan meningkatnya pro-kontra terkait kebijakan pemerintah yang cenderung saling sikut baik di dunia nyata maupun maya. Pandemic telah memproduksi banyak hoax, buzzer politik yang menguasai media massa. Media massa telah menjadi ruang kontestasi kekuasaan. Hal ini terlihat bagaimana ragam kepentingan, baik yang ada di dalam maupun di luar media, ikut memberi pengaruh dalam proses pemberitaan. Media massa dianggap ruang ideal untuk untuk membangun kekuatan secara politik untuk mempengaruhi penerimaan public. Lebih jauh lagi, bahwa media oleh para elit politik

dipandang sebagai pertarungan kuasa antara kekuatan social, di mana media dianggap sebagai entitas yang dibentuk oleh pertarungan tersebut.²

Pola-pola politik seperti ini yang memanfaatkan media sebagai alat menyebar kepentingan yang pragmatis, hoax sangat ramai di masa pandemic ini. Hal ini cenderung jauh dari rasa komitmen kebangsaan dimana pandemic ini justru dibutuhkan komitmen kebersamaan dalam menanganinya. Polarisasi politik ini telah melahirkan sikap kawan dan lawan dalam kehidupan social selama ini. Sehingga yang terjadi adalah krisis pandemic ini terus mengalami sorotan dan lambannya penanganan serta sikap kepercayaan masyarakat kepada pemerintah ikut menurun. Hal inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk menuai simpatik masyarakat demi hasrat politik menuju 2024.

Ditengah polarisasi ini, terbentuk beberapa kekuatan politik ataupun poros politik baru termasuk didalamnya kekuatan politik Islam yang secara khusus bisa dilihat dalam partai-partai Islam. Peta politik 2024 kelihatan sudah menuai banyak perhatian oleh banyak pengamat. Termasuk bagaimana kemungkinan-kemungkinan politik bisa saja terjadi menjadi kejutan-kejutan politik yang setiap saat bisa saja muncul.

Sebenarnya polarisasi politik partai-partai Islam ini tidak bisa lepas dari kontestasi politik sebelum-sebelumnya mulai 2014, 2019 sampai menuju 2024. Polarisasi ini tetap menjadi residu masa lalu yang selalu ada dalam setiap kontestasi. “Blok Islam” tidak terhindari menuju kontestasi politik kedepan. Hal ini bisa dilihat bagaimana respon mereka dalam melihat kebijakan-kebijakan pemerintah selama ini khususnya di masa pandemic ini. Kultur politik modernis-tradisionalis tetap menjadi dua blok kekuatan politik Islam kedepan yang saling berhadap-hadapan. Melihat peta dukungan partai pada pilpres 2014, terlihat pasangan Jokowi-JK diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai

² Heri Budiyo, *Kontestasi Politik dalam Ruang Media: perspektif Critical Discourse Analysis*, Jakarta, Prenadamedia, 2019. h. 13.

Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) bersama Partai Nasional Demokrat (Nasdem). Sedangkan pasangan Prabowo-Hatta diusung oleh Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), bersama Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Golkar dan Partai Bulan Bintang (PBB). Selanjutnya ada perubahan dukungan parpol-parpol Islam di pilpres 2019 seperti pasangan Jokowi-Ma'ruf diusung oleh PDI Perjuangan (PDIP), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Golongan Karya (P.Golkar), Partai Hanura, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Persatuan Indonesia (P.Perindo), Partai Keadilan Persatuan Indonesia (PKPI). Sedangkan pasangan Prabowo-Sandi diusung oleh Partai Gerindra (P. Gerindra), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Demokrat (PD), serta Partai Berkarya.

Peta dukungan pada pilpres dari 2014 dan 2019 diatas kelihatan parpol pendukung khususnya parpol Islam kelihatan tidak begitu mengalami pergeseran berarti kecuali PKS. Dalam sebuah survei terkait elektabilitas partai-partai Islam juga bisa dijadikan dasar argumentasi bagaimana poros umat Islam ini kedepannya. Hasil survey terbaru Pospoll Indonesia bertajuk 'Menakar peluang Capres 2024 dan Tantangan Poros Partai Islam' bahwa Partai politik yang dinilai paling berpihak terhadap umat Islam adalah PKB (17,6%), PKS (15,8%), Gerindra (8,9%), dan PPP (7,4%) yang mana Survey ini dirilis pada tanggal 23 Mei 2021.³

Hasil survey tersebut diatas kelihatan bahwa elektabilitas PKS cukup tinggi dimana ini menjadi indikator penting bahwa jika seandainya poros Islam benar-benar terbentuk di pilpres 2024 nanti maka PKS akan menjadi actor utama. Sebagai partai yang bercorak "muslim modernis" sangat memungkinkan mengusung jagoannya sendiri. Tentu setelah melihat survey dan rekam jejak masa lalu partai-partai Islam tentu tidaklah selalu berjalan mulus. Justru sebaliknya, partai-partai Islam selalu mengalami

³ <https://nasional.sindonews.com/read/435248/12/survei-terbaru-pkb-paling-berpihak-pada-umat-islam-1621764332>. Diakses 28 Agustus 2021.

dinamika yang terus berproses sesuai ekspresi politik elit politik masing-masing partai. Kompleksitas serta ekspresi politik yang beragam selalu saja ada setiap menjelang kontestasi politik. Sehingga real-politik yang identic dengan kepentingan membuat partai-partai Islam tidak pernah solid.

Faktor lain yang paling logis kenapa kemudian kekuatan Islam politik kurang begitu bisa membangun kekuatan politik yang solid adalah elit-elit politik partai nasionalis juga banyak berasal dari ormas-ormas Islam. Keberadaan mereka turut serta berpengaruh dalam merebut suara rakyat. Hal ini bisa terlihat dari banyaknya politisi dari partai-partai nasionalis juga menjadi pengurus di NU, Muhammadiyah termasuk diantara mereka punya jejaring pesantren yang kuat. Fenomena ini menjadi tantangan tersendiri bagi eksistensi dan masa depan partai-partai Islam dalam langgam politik nasional.

Sebaran elit politik dengan jejaring ormas Islam dan pesantren ini turut memberi pengaruh di masa pandemic ini. Hal ini terlihat bagaimana pro-kontra terkait kebijakan-kebijakan pemerintah baik lokal maupun nasional menuai banyak respon yang beragam di kalangan Islam, baik ormasnya, partainya maupun secara personal umat Islam sendiri. Sebutlah misalnya, bagaimana kebijakan tentang shalat di rumah dan masjid ditutup, shaf shalat direnggangkan, kebijakan tentang hari libur nasional hari-hari besar Islam, serta kebijakan-kebijakan terkait kehidupan beragama dan kebergamaan umat selalu riuh dengan beragam respon.

C. Isu Politik di Tengah Pandemi menuju 2024

Pilihan utama dalam mengatasi krisis pandemic ini adalah menyelamatkan kehidupan manusia dalam bentuk pemulihan ekonomi dan pelayanan kesehatan yang terjamin. Butuh strategi dalam penanganannya dimana seluruh elemen bangsa tidak lagi tersekat dalam satu ideologi, partai politik, identitas dalam menangani krisis ini. Keselamatan umat manusia adalah segala-galanya, sehingga semua kebijakan harus berorientasi pada keselamatan bersama. Hal ini akan sangat

berpengaruh besar dalam kehidupan berdemokrasi khususnya di Indonesia. demokrasi tetap menjunjung tinggi kesejahteraan umat manusia, sehingga pola politik apapun harus berorientasi pada kesejahteraan manusia, bukan justru sebaliknya.

Terkait demokrasi ini, masa pandemic ini telah menjadi sorotan serius. Hal ini dapat dilihat bahwa Asia Selatan dan Tenggara telah mengalami beberapa kemunduran demokrasi selama COVID-19 yang paling ekstrem di dunia. Bahkan sebelum virus Corona muncul, telah tumbuh polarisasi politik, sektarianisme liberal, populisme, warisan pemerintahan otoriter, serta pengaruh militer yang berkelanjutan dalam politik ikut merusak tatanan politik demokrasi di kawasan ini. Lebih lanjut dikatakan dalam temuan oleh *Council on Foreign Relations (CFR)* bahwa Sepanjang tahun 2010-an di India, Indonesia, Thailand, Filipina, Sri Lanka, dan kalangan pekerja dan kelas menengah ke bawah juga terlihat sangat tidak puas dengan partai politik dan politisi tradisional yang sering kali berasal dari latar belakang elite dan yang cenderung melalaikan pelayanan social-ekonomi secara menyeluruh.⁴

Hasil temuan dari Council on Foreign Relations (CFR) di atas sangat relevan dibincangkan dalam konteks Indonesia saat ini. Bahwa polarisasi politik turut serta berkontribusi dalam kemunduran demokrasi. Isu-isu sektarianisme, etnisitas, agama selalu ada dan terus meningkat di masa pandemic ini. Sebutlah misalnya bagaimana isu TKA dari Tiongkok, vaksin produksi negara tertentu ditentang, Wuhan sebagai asal muasal Covid-19 menuai sentiment anti Cina, isu komunis Cina, dan seterusnya. Isu-isu ini kemudian dterus digelindingkan oleh ormas-ormas Islam tertentu yang membuat politik Indonesia identic dengan politik rasial ataupun politisasi identitas.

Masa pandemic covid-19 ini sudah kurang lebih 2 (dua) tahun melanda negeri ini. Tak terasa pula pemilu presiden dan wakil presiden akan dihelat. Tentu isu-isu di atas yang ramai di tengah pandemic ini turut menjadi bagian dalam isu strategis menuai

⁴ Joshua Krlantzick, *Menyoal dampak Covid-19 pada Demokrasi di Asia Selatan dan Tenggara*, (Makalah Diskusi), November 2020. h. 1-3.

suara rakyat. Hal ini bisa menjadi alat bagi para politisi untuk menggalang dukungan electoral dari masyarakat. Terlepas bahwa ini bagian dari dinamika politik biasa, hal ini tetap membutuhkan sikap yang cerdas bagi masyarakat menilai perilaku elit politik. Di tengah riuhnya isu politik di tengah pandemic ini tak jarang dibumbuhi dengan ikut membawa-bawa figur calon presiden tertentu dan di sisi yang lain menjatuhkan figur capres yang lain. Pada titik ini terlihat juga bagaimana kelompok-kelompok Islam tertentu mengambil momentum politik yang dinilai tepat dengan mengusung isu-isu populis. Di sinilah terbentuk bagaimana gerakan populisme Islam terlihat begitu massif. Oleh Vedi R. Hadiz,⁵ populisme Islam merupakan bentuk spesifik “mobilisasi social berbasis koalisi multikelas yang asimetris”. Dalam koalisi-koalisi ini kemudian mengangkat agenda politik dan ekonomi yang kurang berakar pada dan didorong oleh, penafsiran agama atau norma agama ataupun budaya dibanding perjuangan yang kongkret untuk merebut sumber daya dan kekuasaan. Jadi, menurut Hadiz, bahwa gerakan populisme ini alih-alih ditentukan sebelumnya secara kaku oleh nilai-nilai dan cita-cita luhur umat, agenda-agenda ini secara terus menerus diolahberulang-ulang secara dinamis oleh imperative untuk berjuang dalam jaringan-jaringan kepentingan dan kekuasaan social tertentu, termasuk pengaruh aktivitas perekonomian global neoliberal yang sangat kontradiktif disertai segala bentuk tekanannya.

Populisme Islam yang menuai perhatian dan cenderung meningkat di masa pandemic ini tak lain adalah keyakinan mereka terkait keberhasilan kaum Islamis di Pilkada DKI 2017 lalu. Bagi mereka, kemenangan pada pilkada DKI adalah kemenangan “populisme politik (identitas) Islam” yang tengah bangkit dan terus menemukan momentumnya di kontestasi-kontestasi politik di masa hadapan. Akan tetapi, hal yang tidak bisa dipungkiri bahwa gerakan populisme politik identitas (Islam) telah mengalami fragmentasi utamanya para alumni yang tergabung aksi massa bela

⁵ Vedi R. Hadiz, *Populisme Islam: di Indonesia dan Timur Tengah*, Jakarta, LP3ES, 2019. h. 40.

Islam 212. Hal ini terlihat bagaimana suara mereka terbelah dalam pilpres 2019 yang ke Jokowi -Ma'ruf dan sebagian ke Prabowo-Sandi.

Terlepas bahwa populisme Islam ini turut memberi warna dalam masa pandemic, gerakan ini tetap selalu mendapatkan momentumnya. Oleh Christa yang dikutip oleh Muhtadi,⁶ bahwa populisme bisa mendapatkan persemaian yang subur ditengah masyarakat yang menghadapi krisis, seperti *pertama*, kondisi krisis ekonomi, pengangguran, kemiskinan, ketimpangan pertumbuhan, dampak globalisasi, eksploitasi sumber daya alam da lain-lain menjadi lahan subur lahirnya klaim-klaim populisme. *Kedua*, populisme merupakan kritik tajam atas kegagalan *representative* democracy. Ketiga, adanya kesenjangan ekonomi yang terjadi di tengah masyarakat termasuk dengan adanya ketimpangan dalam kehidupan social tersebut kemudian dimanfaatkan oleh pemimpin-pemimpin dengan narasi politik yang bisa membuat masyarakat terlena.

Pada titik ini, pandemic covid-19 sebagai isu nasional bahkan global tertutupi oleh riuhnya kepentingan politik. Isu kesehatan dan pemulihan ekonomi yang sepatutnya butuh dukungan bersama di tengah pandemic ini justru tertutupi oleh mulai memanasnya politik menuju 2024 nanti. Isu strategis seperti peta koalisi partpol pada pilpres 2024, survey-survey elektibilitas capres dan cawapres 2024 yang turut menambah tensi politik bahkan terkesan politis. Energi politik menuju pilpres 2024 justru kelihatan sangat berpengaruh bagi penanganan pandemic di Indonesia. Sehingga nampak bagaimana pandemic covid-19 ini akan terus dijadikan momentum kepentingan politik menuju 2024 ketimbang penanganan pandemic ini secara serius. Termasuk di dalamnya bagaimana kelompok-kelompok Islam(is) juga berada dalam arena perebutan ruang-ruang strategis politik kepentingan menuju 2024.

⁶ Burhanuddin Muhtadi, *Populisme Politik Identitas & Dinamika Elektoral: Mangurai Jalan Panjang Demokrasi Prosedural*, Malang, Intrans Publishing, 2019. h. 5.

D. Kesimpulan

Polasirasi politik dalam setiap kontestasi politik di Indonesia cenderung melihat adanya titik kompromi dalam masyarakat pemilih. Ini menjadi sebuah pemandangan umum di mana poros politik tertentu cenderung selalu muncul sebagai pola kompromi yang terus menerus terbangun dalam proses elektoral. Polarisasi politik dan populisme politik (Islam) akan terus ada dalam arena perebutan kekuasaan. Polarisasi politik akan terus ada sebagai fenomena alam yang sudah dianggap biasa. Perbedaan yang terus-menerus ada seperti sebaran dukungan partai-partai Islam, terbentuknya polarisasi perwakilan bahkan perbedaan secara ideologis pun menjadi hal yang selalu ada dalam setiap perhelatan 5 (lima) tahunan ini. Akan tetapi, fenomena ini tidak berlangsung lama dan cenderung sifatnya sementara yang pada akhirnya bertemu pada titik kompromi. Kekuatan kekuatan Islam, seperti partai-partai politik Islam bahkan ormas-ormasnya juga kelihatan sangat dinamis dalam menentukan dukungan politiknya. Oleh karena itu, melihat peta politik 2024, polarisasi politik dan agama masih terus mewarnai dan tetap melihat momentum yang menguntungkan. Poros kekuatan (politik) Islam belum terlihat adanya komitmen sebagai oposisi atau berada dilingkar kekuasaan sebagai pilihan politik. Masih cenderung pragmatis dan melihat peluang-peluang politik yang menguntungkan.

Daftar Pustaka

- Abdul Gaffar Karim, Mengelola Polarisasi Politik dalam Sirkulasi Kekuasaan di Indonesia: Catatan bagi Agenda Riset, *POLITIKA: Jurnal Ilmu Politik*, Volume 10, Nomor 2, Oktober 2019.
- Burhanuddin Muhtadi, *Populisme Politik Identitas & Dinamika Elektoral: Mangurai Jalan Panjang Demokrasi Prosedural*, Malang, Intrans Publishing, 2019.
- Heri Budiyanto, *Kontestasi Politik dalam Ruang Media: perspektif Critical Discourse Analysis*, Jakarta, Prenadamedia, 2019.
- Joshua Krlantzick, *Menyoal dampak Covid-19 pada Demokrasi di Asia Selatan dan Tenggara*, (Makalah Diskusi), November 2020.
- Vedi R. Hadiz, *Populisme Islam : di Indonesia dan Timur Tengah*, Jakarta, LP3ES, 2019
- <https://nasional.sindonews.com/read/435248/12/survei-terbaru-pkb-paling-berpihak-pada-umat-islam-1621764332>.